I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan pesat kawasan perkotaan telah menimbulkan sejumlah permasalahan yang kompleks, termasuk tingginya angka urbanisasi, berkurangnya lahan hijau, dan meningkatnya ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah. Di sisi lain, keterbatasan ruang untuk aktivitas pertanian di kota sering kali memperburuk ketahanan pangan lokal dan menciptakan ketimpangan akses terhadap pangan sehat. Masalah ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan kurangnya inisiatif untuk memanfaatkan lahan kosong secara produktif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, *Urban Farming* dapat dijadikan sebagai solusi inovatif yang tidak hanya menawarkan potensi ekonomi melalui produksi pangan lokal, tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan.

Saat ini, paradigma pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan telah bergeser. Tidak hanya berfokus pada fungsi ekologis dan estetika, tetapi juga menjadi ruang produktif melalui kegiatan *Urban Farming*. Pendekatan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan masyarakat kota. *Urban Farming* semakin dianggap penting, terutama dalam konteks krisis ekonomi yang dapat mengancam ketahanan pangan, khususnya bagi masyarakat miskin kota. Penelitian menunjukkan bahwa *Urban Farming* dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung ekonomi lokal di daerah perkotaan dan penelitian lain juga menyoroti kontribusi

Urban Farming terhadap keberlanjutan kota (Juwariyah dan Adisaputro, 2023), serta dampaknya terhadap ketahanan pangan di Surabaya (Sari dan Santoso, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Satterthwaite (2017) dan Béné (2021), rumah tangga miskin di perkotaan, khususnya di negara-negara berkembang, sering menghabiskan sekitar 30% hingga 60% dari total pendapatannya untuk membeli makanan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga miskin di pedesaan, yang menandakan bahwa biaya pangan di perkotaan lebih mahal. Hal ini dapat memperburuk ketahanan pangan di kalangan kelompok miskin kota. Selain itu, berkurangnya ketersediaan pangan di kota-kota besar juga dipengaruhi oleh konversi lahan pertanian yang pesat (Pratiwi *et al*, 2018). Permintaan yang terus meningkat untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas perkotaan sering kali mengorbankan lahan pertanian, yang memperburuk ketahanan pangan. Proses urbanisasi yang cepat mengarah pada konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian (Kumar dan Swaminathan, 2017). Data menunjukkan perubahan signifikan dalam proporsi wilayah kota dan desa di Jawa dalam dua dekade terakhir, yaitu dari 70% desa dan 30% kota menjadi 60% kota dan 40% desa. Konversi lahan ini mengancam ketahanan pangan dan memperbesar potensi masalah gizi buruk di kota-kota besar (Setyarini *et al.*, 2023).

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan perekonomian, kota-kota besar mengalami transformasi yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi yang semakin canggih mendorong efisiensi di sektor industri, transportasi, dan layanan publik, namun, di sisi lain, hal ini juga memperburuk tantangan terkait penggunaan lahan dan ketahanan pangan. Peningkatan ekonomi perkotaan menyebabkan pertumbuhan permintaan untuk ruang bagi pusat-pusat

komersial, perumahan, dan infrastruktur, yang sering kali mengorbankan lahan yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan pertanian. Di satu sisi, teknologi yang maju memungkinkan terciptanya solusi-solusi baru dalam bidang pertanian, namun di sisi lain, kemajuan ini seringkali memperparah permasalahan ketergantungan pada pasokan pangan dari luar kota. Peningkatan urbanisasi, yang didorong oleh peluang ekonomi di kota-kota besar, memperburuk ketimpangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan dalam hal akses pangan dan ruang terbuka hijau yang memadai (Setyarini *et al.*, 2023). Dampak dari fenomena ini menuntut adaptasi strategi kebijakan yang lebih inklusif untuk menanggulangi ketahanan pangan di tengah pesatnya perubahan teknologi dan perkembangan ekonomi.

Pertambahan jumlah penduduk yang pesat, peningkatan kualitas hidup, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat turut berimplikasi pada meningkatnya berbagai kebutuhan, baik dalam hal fasilitas umum, perumahan, maupun infrastruktur lainnya. Peningkatan jumlah penduduk secara langsung menyebabkan permintaan yang lebih tinggi akan lahan untuk pembangunan perumahan, ruang terbuka hijau, serta fasilitas publik seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit. Hal ini memicu perubahan signifikan dalam pola penggunaan lahan, sering kali mengorbankan sektor pertanian dan ruang terbuka yang sebelumnya digunakan untuk mendukung ketahanan pangan (Setyarini, 2023).

Perebutan ruang di perkotaan semakin intens, terutama dengan semakin terbatasnya lahan yang harus dibagi antara pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian yang mendukung ketahanan pangan. Ketika konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur tidak dikelola dengan bijak, hal ini dapat memperburuk masalah ketahanan pangan,

yang pada gilirannya berisiko memperparah kesenjangan pangan di kota-kota besar. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh penelitian Pratiwi *et al.* (2018) dan Setyarini *et al.* (2023), proses urbanisasi yang cepat di Indonesia telah menyebabkan konversi lahan pertanian yang pesat, yang mengancam ketahanan pangan masyarakat perkotaan.

Tabel 1. 1. Hasil Sensus Pencacahan Pertanian 2023

Kategori		Subkategori/Jenis	Jumlah	Keterangan
Pelaku Pertanian	Usaha	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP)	28.419.398 rumah tangga	Naik 1,7% dari 2013
		Usaha Pertanian Perorangan (UTP)	29-342.202 usaha	Naik 6,4% dari 2013
		Perusahaan Pertanian Badan Hukum	5.705 perusahaan	Termasuk PT. Koperasi
		Usaha Non-Pertanian (RTUP + UTP lainnya)	19.926 unit	Usaha di luar pertanian
Jenis Pertanian	Usaha	Tanaman Pangan	RT:15.550.786 UTP: 15.772.098	Skala rumah tangga dan perorangan
		Hortikultura	RT: 9.495.675 UTP: 9.623.027	
		Perkebunan	RT: 10.877.356 UTP: 11.101.438	
		Peternakan	RT: 12.064.136 UTP: 12.190.552	
		Kehutanan	RT: 1.852.995 UTP: 1.893.767	
		Perikanan	RT: 3.467.931 UTP: 3.495.411	
		Lainnya	RT: 362.773 UTP: 365.291	
Urban Farming (Perkotaan)		Rumah Tangga <i>Urban Farming</i>	12.919 rumah tangga	Pertanian di area perkotaan
		Usaha Perorangan <i>Urban Farming</i>	13.019 usaha	
Petani Millennial		Usia 19-39 Tahun	6.183.009 orang	21,93% dari total petani

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sejumlah temuan penting yang menggambarkan

kondisi terkini sektor pertanian di Indonesia. Secara keseluruhan, terdapat 28,4 juta Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) dan 29,3 juta Usaha Pertanian Perorangan (UTP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2013, dengan RTUP naik sebesar 1,7% dan UTP naik sebesar 6,4%. Selain itu, jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum juga tercatat sebanyak 5.705 unit, sedangkan unit usaha non-pertanian yang juga dicatat dalam sensus ini mencapai 12.926 unit.

Dalam hal jenis usaha pertanian, tanaman pangan menjadi sektor yang paling banyak digeluti, yaitu oleh sekitar 15,5 juta rumah tangga dan 15,7 juta UTP. Sektor lainnya yang juga menonjol meliputi hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan jenis usaha lainnya. Seluruh sektor ini menunjukkan bahwa pertanian di Indonesia masih sangat beragam dan tersebar dalam berbagai jenis kegiatan.

Menariknya, data juga menyoroti tumbuhnya kegiatan *Urban Farming* atau pertanian di wilayah perkotaan. Tercatat ada 12.919 rumah tangga dan 13.019 unit usaha perorangan yang terlibat dalam *Urban Farming*. Fakta ini mencerminkan adanya potensi besar untuk mengembangkan pertanian kota di tengah keterbatasan lahan hijau di wilayah urban. *Urban Farming* dinilai sebagai alternatif efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan di perkotaan.

Sensus ini juga menunjukkan peningkatan partisipasi petani milenial, yaitu petani berusia 19 hingga 39 tahun. Jumlah mereka mencapai 6,18 juta orang atau sekitar 21,93% dari total petani. Kehadiran generasi muda ini menjadi harapan baru

untuk keberlanjutan sektor pertanian, terutama melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan pertanian, termasuk dalam praktik *Urban Farming* .

Secara keseluruhan, hasil sensus ini memberikan gambaran bahwa sektor pertanian di Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman, mulai dari urbanisasi hingga keterbatasan lahan. Potensi besar yang tercermin dari data ini diharapkan dapat mendorong kebijakan dan program yang mendukung pertanian berkelanjutan dan inklusif, baik di pedesaan maupun perkotaan.

Urban Farming sebagai konsep dan praktik bercocok tanam di lingkungan perkotaan telah berkembang sejak beberapa dekade terakhir sebagai respons terhadap permasalahan ketahanan pangan dan keterbatasan ruang hijau di kota-kota besar. Awalnya, *Urban Farming* muncul secara informal di berbagai kota di negara-negara berkembang sebagai cara warga memanfaatkan lahan kosong untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari (Mougeot, 2000). Pada tahun 1970-an dan 1980-an, konsep ini mulai mendapat perhatian lebih luas dari kalangan akademisi dan pembuat kebijakan sebagai strategi alternatif ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat (Zezza dan Tasciotti, 2010). *Urban Farming* juga berkembang seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang produktif (FAO, 2011). Di beberapa negara maju, *Urban Farming* mulai dikembangkan dengan pendekatan teknologi modern seperti hidroponik dan aquaponik untuk mengatasi keterbatasan lahan dan meningkatkan produktivitas (Despommier, 2010). Di Indonesia, praktik *Urban Farming* mulai dikenal sejak awal 2000-an dan semakin mendapat dukungan melalui berbagai program pemerintah dan komunitas lokal, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya (Prayogo *et al.*, 2017).

Perkembangan ini menunjukkan bagaimana *Urban Farming* tidak hanya menjadi solusi praktis terhadap masalah pangan, tetapi juga bagian dari gerakan urban sustainability yang semakin penting dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan perubahan iklim (Bryld, 2003).

Perkembangan *Urban Farming* di Surabaya, sebagai bagian dari solusi ketahanan pangan perkotaan, semakin menarik perhatian. Surabaya, sebagai kota metropolitan yang padat, menghadapi tantangan besar dalam mengelola ruang terbuka hijau yang terbatas. Namun, meskipun demikian, sektor pertanian perkotaan, terutama *Urban Farming*, mulai berkembang pesat. Menurut data sensus pertanian tahun 2023, Surabaya tercatat memiliki sejumlah rumah tangga dan usaha pertanian perorangan yang terlibat dalam kegiatan ini. Keberadaan *Urban Farming* di kota ini bukan hanya menjawab tantangan ketahanan pangan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana teknologi dan inovasi dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang terbuka yang terbatas, serta mendukung keberlanjutan dalam konteks urbanisasi yang terus berkembang. *Urban Farming* menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar kota, sambil menciptakan ruang hijau yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Peran aktif masyarakat dalam mengembangkan *Urban Farming* juga menjadi indikator positif yang menunjukkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan lokal. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai inovasi teknologi, *Urban Farming* di Surabaya berpotensi menjadi model yang dapat diadopsi oleh kota-kota lain di Indonesia.

Tabel 1. 2. Jumlah RT dan UTP Perorangan *Urban Farming*

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Perkotaan (RT) Urban Farming	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Urban Farming
Karang Pilang	8	8
Jambangan	4	4
Gayungan	1	1
Wonocolo	-	-
Tenggilis Mejoyo	4	5
Gunung Anyar	1	1
Rungkut	4	4
Sukolilo	3	3
Mulyorejo	3	3
Gubeng	6	6
Wonokromo	-	-
Dukuh Pakis	1	1
Wiyung	1	1
Lakarsantri	-	-
Sambikerep	3	3
Tandes	4	4
Suko Manunggal	-	-
Sawahan	2	2
Tegalsari	-	-
Genteng	1	1
Tambaksari	1	1
Kenjeran	-	-
Bulak	-	-
Simokerto	4	4
Semampir	1	1
Pabean Cantian	-	-
Bubutan	1	1
Krempangan	1	1
Asemrowo	-	-
Benowo	1	1
Pakal	1	1
Total	56	57

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan adanya potensi besar Kota Surabaya dalam mengembangkan *Urban Farming* sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan lokal di tengah tantangan urbanisasi dan konversi lahan. Melihat angka yang tercatat dalam sensus ini, peran sektor pertanian di Surabaya, meski

terbatas ruang, dapat menjadi faktor kunci dalam menciptakan keberlanjutan pangan dan memperkuat ekonomi lokal. Kehadiran sektor ini penting untuk mendukung ketersediaan pangan yang lebih terjangkau dan mengurangi dampak negatif dari alih fungsi lahan yang cepat terjadi di kota-kota besar. Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang padat penduduk dan tingkat pembangunan infrastruktur yang tinggi. Kondisi ini mengakibatkan semakin menyempitnya lahan pertanian produktif. Namun demikian, tantangan tersebut juga membuka peluang untuk mengembangkan inovasi pertanian berbasis perkotaan. *Urban Farming* hadir sebagai salah satu solusi alternatif dalam memanfaatkan lahan sempit, serta memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat kota. Namun, perkembangan *Urban Farming* tersebut tidak merata di seluruh wilayah kota. Terdapat beberapa kecamatan yang belum optimal dalam mengimplementasikan kegiatan ini. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (2024) menunjukkan bahwa sekitar 30% kecamatan masih belum memiliki program *Urban Farming* yang terstruktur. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat pertanian perkotaan, serta minimnya dukungan infrastruktur. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan ketahanan pangan antar wilayah di Surabaya dan menghambat pemanfaatan ruang terbuka hijau yang ada secara maksimal.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) telah menginisiasi dan mengembangkan program *Urban Farming* untuk mendorong kemandirian pangan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini mencakup berbagai bentuk dukungan, seperti bantuan sarana produksi, pelatihan

teknis, dan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala, antara lain terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan teknis pada sebagian petani urban, serta belum optimalnya pemasaran hasil pertanian. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang lebih terarah dan komprehensif untuk memaksimalkan potensi program ini. Melihat dinamika pelaksanaan *Urban Farming* dan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, diperlukan suatu analisis menyeluruh untuk merumuskan strategi pengembangan yang tepat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis SWOT, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pelaksanaan program ini. Program *Urban Farming* memiliki potensi untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong, serta memperbaiki kualitas lingkungan dengan menyediakan ruang hijau di tengah perkotaan.

Urban Farming di Surabaya didukung oleh beberapa kekuatan (*Strength*) utama yang menjadi fondasi pengembangannya. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) telah menunjukkan komitmen kuat dengan menyediakan berbagai bantuan sarana dan prasarana yang memadai, serta pelatihan teknis dan pendampingan intensif oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Dukungan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas petani urban tetapi juga memperkuat jaringan komunitas pertanian perkotaan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan dan gaya hidup sehat turut menjadi pendorong kuat dalam memperluas partisipasi warga dalam kegiatan *Urban Farming*. Adopsi teknologi pertanian modern seperti hidroponik dan aquaponik juga menjadi kekuatan penting, memungkinkan pemanfaatan lahan yang

terbatas secara maksimal serta menarik minat generasi muda untuk terlibat dalam pertanian perkotaan. Sinergi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam berbagai program edukasi dan ekonomi kreatif semakin menguatkan potensi pengembangan *Urban Farming* di Surabaya.

Namun, di sisi lain, terdapat kelemahan (*Weakness*) yang dihadapi dalam pengembangan *Urban Farming*, seperti keterbatasan lahan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknik budidaya yang berkelanjutan, serta tantangan dalam keberlanjutan program karena minimnya pendanaan dan tenaga ahli. DKPP Kota Surabaya juga menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang terlatih secara khusus di bidang pertanian urban, serta kesulitan dalam menjangkau seluruh kelompok tani secara merata karena keterbatasan jumlah penyuluh. Selain itu, persepsi sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa pertanian hanya layak dilakukan di pedesaan turut menjadi hambatan dalam perluasan cakupan program. Kondisi ini menuntut upaya inovatif dan kolaborasi yang lebih intensif untuk mengatasi kendala tersebut dan memastikan program dapat berjalan efektif.

Sementara itu, terdapat berbagai peluang (*Opportunity*) yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat *Urban Farming* di Kota Surabaya. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan serta tren gaya hidup sehat membuka ruang bagi pertanian perkotaan untuk berkembang. DKPP dapat memanfaatkan peluang ini dengan menjalin kerja sama lebih luas bersama komunitas, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk menciptakan program berbasis edukasi dan ekonomi kreatif. Selain itu, adopsi teknologi pertanian modern, seperti hidroponik dan aquaponik, mulai diperkenalkan DKPP sebagai solusi terhadap keterbatasan lahan sekaligus sebagai sarana inovatif untuk

menarik minat generasi muda dalam bertani. Penggunaan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi tetapi juga dapat memperluas cakupan *Urban Farming* di wilayah kota. Dengan memanfaatkan peluang ini secara optimal, *Urban Farming* dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi signifikan bagi ketahanan pangan dan kualitas hidup warga kota. Perlu sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mewujudkan potensi ini secara maksimal.

Meski demikian, *Urban Farming* juga menghadapi ancaman (*Threats*) yang perlu diantisipasi dengan baik. Perubahan tata guna lahan yang pesat akibat pembangunan infrastruktur dan perumahan dapat mengurangi ruang terbuka yang potensial untuk pertanian. DKPP Kota Surabaya berhadapan dengan tantangan dalam mempertahankan lokasi-lokasi *Urban Farming* yang terancam tergeser oleh kebutuhan pembangunan kota. Selain itu, belum adanya regulasi atau kebijakan khusus yang mengatur secara berkelanjutan tentang perlindungan lahan pertanian urban serta pembiayaan jangka panjang menjadi hambatan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan program. Faktor-faktor ini jika tidak segera diatasi dapat menghambat perkembangan *Urban Farming* dan mengurangi manfaat sosial ekonomi yang dapat diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang komprehensif dan dukungan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mengamankan masa depan *Urban Farming* di Surabaya. Upaya mitigasi ancaman ini menjadi langkah penting dalam menjamin keberlanjutan ketahanan pangan lokal melalui pertanian perkotaan.

Melihat berbagai tantangan dalam pengembangan *Urban Farming* di Surabaya, seperti keterbatasan lahan, minimnya pendanaan, dan belum adanya

regulasi yang mendukung secara berkelanjutan, maka diperlukan kajian strategis yang dapat menjawab permasalahan tersebut secara holistik. Selain itu, masih terbatasnya penelitian yang menyoroti peran kelembagaan pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, dalam mendukung ketahanan pangan melalui *Urban Farming* menjadi celah penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi tinggi sebagai dasar dalam merumuskan strategi pengembangan yang adaptif dan kontekstual. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Strategi Pengembangan *Urban Farming* di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi *Urban Farming*, menganalisis strategi pengembangan program, serta memberikan rekomendasi strategis bagi keberlanjutan *Urban Farming* di Kota Surabaya. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan komprehensif serta strategi yang mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung ketahanan pangan perkotaan.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan utama dalam pengembangan *Urban Farming* di Kota Surabaya adalah belum adanya strategi pengembangan yang komprehensif dan terencana dengan baik. Meskipun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya telah berupaya mendorong pertanian perkotaan sebagai bagian dari ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi. Tantangan-tantangan tersebut antara lain keterbatasan lahan yang tersedia, kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknik-teknik pertanian yang

sesuai untuk lingkungan perkotaan, serta keterbatasan dukungan dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia. Selain itu, belum adanya strategi yang jelas dalam mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada, seperti perubahan tata guna lahan dan kurangnya kebijakan yang mendukung secara berkelanjutan, menghambat potensi pengembangan *Urban Farming* di Kota Surabaya.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor internal berupa *Strengths* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan) serta faktor eksternal berupa *Opportunity* (peluang) dan *Threats* (ancaman) yang memengaruhi pengembangan *Urban Farming* di DKPP Kota Surabaya ?
2. Bagaimana strategi pengembangan *Urban Farming* yang sesuai berdasarkan analisis SWOT di lingkungan DKPP Kota Surabaya?
3. Apa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh DKPP Kota Surabaya dalam meningkatkan keberlanjutan *Urban Farming* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan disusunnya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi faktor internal yaitu *Strengths* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan), serta faktor eksternal yaitu *Opportunity* (peluang) dan *Threats* (ancaman) yang memengaruhi pengembangan *Urban Farming* di Kota Surabaya.
2. Menganalisis strategi pengembangan yang dapat diterapkan dalam program *Urban Farming* yang dijalankan oleh DKPP Kota Surabaya.

3. Memberikan rekomendasi strategis yang dapat digunakan DKPP dalam mendukung keberlanjutan *Urban Farming* di Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang agribisnis, khususnya terkait strategi pengembangan *Urban Farming*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya serta memperkuat peran universitas dalam mendukung inovasi pertanian perkotaan yang berkelanjutan.

1.4.2. Bagi Fakultas Pertanian

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan isu pertanian perkotaan dan ketahanan pangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan ajar dan referensi akademik untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai strategi optimal dalam mengembangkan *Urban Farming* di perkotaan.

1.4.3. Bagi DKPP Kota Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi DKPP Kota Surabaya dalam mengoptimalkan program *Urban Farming*. Dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberlanjutan *Urban Farming*, DKPP dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mengatasi tantangan yang ada, serta memperkuat peran *Urban Farming* dalam mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan di Kota Surabaya.